

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori dan studi terkait yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2.1. Landasan Teori

Landasan teori di bawah ini membahas variabel yang digunakan dalam proses penelitian antara lain indeks kebahagiaan, indeks demokrasi, indeks kebebasan ekonomi, indeks perdamaian global dan indeks persepsi korupsi.

2.1.1. Teori Utilitas

Utilitas didefinisikan sebagai kepuasan konsumen yang diperoleh dari pembelian barang dan jasa (Ansari, 2017). Jeremy Bentham (1748-1832) dalam Pressman (2000) menyatakan bahwa manusia dikuasai oleh 2 hal yaitu kesedihan (termasuk kekecewaan, penyesalan, keinginan dan lain sebagainya) dan kesenangan (termasuk kekayaan, keahlian, kekuasaan, nama baik, ingatan, imajinasi, kebaikan, kedengkian, dan lain sebagainya). Prinsip kepuasan sebagai suatu prinsip moral, pertimbangan akan kesedihan dan kesenangan menjadi penentu apa yang seharusnya dilakukan, dan hak-hak yang benar untuk dikerjakan adalah apa saja yang memaksimalkan kesenangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenangan dan kesedihan seperti kesehatan, gender, usia, pendidikan, dan keteguhan pikiran.

Rahardja dan Manurung (2010) dalam Ansari (2017) mengemukakan bahwa utilitas (*utility*) adalah manfaat yang diperoleh karena mengonsumsi

barang. Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh konsumen. Utilitas total (*total utility*/TU) adalah manfaat total yang didapat dari konsumsi seluruh barang. Utilitas marginal (*marginal utility*/MU) adalah tambahan manfaat yang didapat karena menambah konsumsi sebanyak satu unit barang.

Salah satu pendekatan dasar dalam teori permintaan konsumen adalah utilitas marginal yang terukur (kepuasan) atau disebut juga pendekatan utilitas cardinal (*cardinal utility approach*) (Bilas, 1992). Pendekatan daya guna marginal menurut Mansoer (2002), didasarkan pada hukum daya guna marginal yang menurun (*The Law of Diminishing Marginal Utility*). Hukum ini menyatakan bila konsumsi suatu barang terus dipenuhi maka hal ini pada awalnya akan meningkatkan kepuasan total yang dirasakan konsumen, mencapai maksimum (kejenuhan) dan kemudian menurun. Konsumen yang mengonsumsi barang dalam jumlah yang semakin meningkat maka kepuasan totalnya (*total utility*) akan semakin meningkat, namun tambahan kepuasan (*marginal utility*) semakin menurun.

2.1.2. Teori Kelembagaan

Kelembagaan merupakan batasan-batasan yang dibuat untuk menciptakan pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi (North, 1990). Berdasarkan bentuknya, kelembagaan dikelompokkan menjadi 2 yaitu informal dan formal. Kelembagaan informal merupakan peraturan tidak tertulis, seperti adat istiadat dan tradisi. Sedangkan, kelembagaan formal merupakan peraturan tertulis, seperti perundang-undangan dan perjanjian kontrak. Dalam konteks ekonomi kelembagaan,

kelembagaan/institusi dan organisasi memiliki makna yang berbeda. North (1990) mendefinisikan organisasi sebagai wadah tempat manusia berinteraksi, seperti organisasi politik dan ekonomi. Sedangkan lembaga adalah sekumpulan peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh organisasi.

Terdapat 2 macam ekonomi kelembagaan yaitu ekonomi kelembagaan lama (*Old Institutional Economics* atau OIE) dan ekonomi kelembagaan baru (*New Institutional Economics* atau NIE). OIE muncul setelah adanya kritik oleh Thorsten Veblen terhadap teori ekonomi klasik dan neoklasik. Veblen menentang gagasan yang menyatakan manusia merupakan makhluk rasional yang selalu menentukan pilihan-pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan untung rugi secara ekonomi. Veblen berpendapat bahwa manusia menentukan pilihan bukan hanya berdasarkan motif ekonomi, tetapi juga dimensi lain seperti perasaan, kecenderungan insting, serta kebiasaan yang berhubungan dengan kebudayaan (Saskara, 2017). NIE merupakan teori yang menggambarkan adanya ketidaksempurnaan informasi sehingga terciptanya biaya transaksi. Semakin informasi tidak sempurna maka biaya transaksi yang dikeluarkan semakin besar. Menurut Coase (1998), biaya transaksi mempengaruhi kelembagaan dan pilihan-pilihan ekonomi yang orang lakukan. Selain biaya transaksi, NIE juga memasukkan paradigma *property rights*, di mana efisiensi alokasi sumber daya didasarkan oleh faktor kepemilikan (*property rights*) sebagai sebuah lembaga (institusi).

2.1.3. Indeks Kebahagiaan

Kebahagiaan merupakan perasaan atau keadaan kepuasan yang berada secara internal di dalam diri seseorang (Uchida dan Oishi, 2016). Kebahagiaan didefinisikan juga sebagai pengalaman psikologis interaksi antara faktor subjektif dan objektif, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu diantaranya psikologi, sosiologi, ekonomi, dan disiplin ilmu lainnya (Xie *et al.*, 2021). Studi ekonomi pertama yang mempelajari tentang kebahagiaan dilakukan oleh Richard A. Easterlin pada tahun 1974, yang dimuat dalam sebuah artikel berjudul “*Does Economic Growth Improve the Human Lot : Some Empirical Evidence*”. Dalam studi kebahagiaan ini, Easterlin menggunakan data dari *World Values Survey* (WVS) untuk meneliti hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan di Amerika. Penelitian yang dilakukan oleh Easterlin ini dikenal dengan Paradoks Easterlin. Dari penelitian yang dilakukan, Easterlin menemukan bahwa pendapatan dan kebahagiaan berkorelasi satu sama lain sampai ambang batas tertentu. Setelah itu, tingkat pendapatan dan kebahagiaan tidak berhubungan secara signifikan.

Frey dan Stutzer (2000) mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi sumber kesejahteraan individu. Pertama, faktor kelembagaan atau konstitusional, di mana demokrasi adalah hal yang paling utama. Kedua, faktor ekonomi makro mikro seperti pendapatan, inflasi serta pengangguran. Frey menjelaskan bahwa di sebagian besar negara, individu yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi melaporkan kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi daripada orang dengan pendapatan rendah. Kemudian, pengangguran berkorelasi dengan ketidakbahagiaan individu. Dalam hal *trade off*, pendapatan

akan jauh lebih tinggi diperlukan untuk menanggung biaya orang-orang yang tidak bekerja. Ketiga, faktor *personality* dan demografis yang terdiri dari kesehatan, usia, jenis kelamin dan keadaan keluarga.

Dalam mengukur tingkat kebahagiaan di suatu wilayah digunakan suatu indikator yang dikenal dengan indeks kebahagiaan. Sejak tahun 2012, lembaga *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) menerbitkan *World Happiness Report* yang berisi tentang skor dan peringkat indeks kebahagiaan negara-negara di dunia yang didasarkan pada data dari survei *Gallup World Poll* (GWP). Data dari survei GWP merupakan hasil jawaban dari para responden tentang evaluasi kepuasan hidup yang ditanyakan dalam jajak pendapat. Dalam survei ini, GWP meminta para responden untuk membayangkan kehidupan yang dijalani seperti sebuah tangga, dengan tangga terbawah bernilai 0 (kehidupan terburuk) dan tangga teratas bernilai 10 (kehidupan terbaik). Indeks kebahagiaan dalam *World Happiness Report* secara khusus berfokus pada 6 aspek diantaranya GDP per kapita, dukungan sosial, angka harapan hidup, kebebasan, tingkat kedermawanan dan tidak adanya korupsi.

2.1.4. Indeks Demokrasi

2.1.4.1. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos", yang berarti rakyat, dan "kratos" yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Secara sederhana, demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan pada kehendak rakyat. Ciri-ciri mendasar adanya demokrasi dalam sebuah negara ditandai dengan jalannya

pemerintahan berdasarkan keputusan mayoritas dan persetujuan yang diperintah, adanya pemilu yang bebas dan adil, perlindungan hak-hak minoritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (EIU, 2015:42).

Setiap negara umumnya memiliki kondisi demokrasi yang berbeda-beda. Untuk mengukur seberapa baiknya kondisi demokrasi di suatu wilayah digunakan suatu indikator berupa indeks demokrasi. Lembaga yang melakukan pengukuran indeks demokrasi secara global adalah *Economist Intelligence Unit* (EIU). Indeks demokrasi yang dilakukan oleh EIU bertujuan untuk memberikan penilaian terkait kondisi demokrasi di suatu negara pada skala 0 sampai 10. Pengukuran indeks demokrasi oleh EIU didasarkan pada 60 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima kategori utama diantaranya:

1. Proses elektoral dan pluralisme
2. Kebebasan sipil
3. Fungsi pemerintahan
4. Partisipasi politik
5. Budaya politik

Data indeks demokrasi yang digunakan oleh EIU diperoleh dari survei pendapat para ahli, dengan memberikan 60 indikator pertanyaan dengan dua atau tiga alternatif jawaban yang diberikan diantaranya 1 (untuk jawaban “ya”); 0,5 (untuk jawaban “ragu-ragu”); dan 0 (untuk jawaban “tidak”). Selain survei pendapat para ahli, EIU memanfaatkan data survei opini publik, terutama data dari *World Values Surveys*. Sumber lain yang digunakan oleh EIU adalah

Eurobarometer Surveys, Gallup polls, Asian Barometer, Latin American Barometer, Afrobarometer, dan survei nasional (EIU, 2015;47). EIU mengelompokkan negara-negara di dunia kedalam 4 jenis demokrasi sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Jenis Demokrasi Beserta Besaran Skala (0-10)

Jenis Demokrasi	Besaran Skala (0-10)
Demokrasi Penuh	$x > 8$
Demokrasi Cacat	$6 < x \leq 8$
Rezim Campuran	$4 < x \leq 6$
Rezim Otoriter	$x < 4$

Sumber : *Economist Intelligence Unit 2015*

1. Demokrasi penuh, adalah negara-negara yang memiliki kebebasan politik dan kebebasan sipil, budaya politik yang kondusif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pers bersifat independen.
2. Demokrasi cacat, adalah negara-negara yang memiliki kebebasan politik dan kebebasan sipil, namun memiliki tata kelola pemerintahan yang kurang baik serta budaya dan partisipasi politik yang rendah.
3. Rezim campuran, adalah negara-negara dengan kebebasan politik dan kebebasan sipil yang lemah, pemilu seringkali tidak berjalan adil dan bebas, korupsi yang meluas, tata kelola pemerintahan yang kurang baik serta adanya tekanan terhadap pers.
4. Rezim otoriter, adalah negara-negara yang tidak memiliki kebebasan politik dan kebebasan sipil, institusi demokrasi yang kecil, serta kebebasan pers yang dikendalikan oleh negara atau kelompok tertentu yang berkuasa.

2.1.4.2. Hubungan Indeks Kebahagiaan dan Indeks Demokrasi

Ott (2005) dalam Bennett dan Nikolaev (2016) menunjukkan bahwa negara dengan kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan yang lebih baik cenderung memiliki distribusi kebahagiaan yang lebih merata. Selanjutnya, Diener *et al.* (2011) dalam Suzanna dan Paleologou (2022) mengemukakan bahwa terdapat 3 pendekatan utama untuk menjelaskan konsep kebahagiaan, salah satunya adalah institusi politik. Melalui kebebasan berpolitik, Diener menjelaskan bahwa orang dapat dengan leluasa berpartisipasi dalam proses politik, memberikan suara secara bebas dalam pemilihan yang sah, serta memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri.

2.1.5. Indeks Kebebasan Ekonomi

2.1.5.1. Pengertian Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi didefinisikan sebagai hak individu untuk membuat segala keputusan ekonomi berdasarkan tenaga dan propertinya sendiri (Yilmaz dan Tag, 2016). Kebebasan ekonomi di suatu negara tercermin ketika kekuatan pengambilan keputusan ekonomi tersebar luas dan alokasi sumber daya untuk produksi dan konsumsi didasarkan pada persaingan bebas dan terbuka sehingga setiap individu atau perusahaan memiliki kesempatan yang adil untuk berhasil. Miller dan Kim (2015) mengemukakan terdapat tiga prinsip dasar kebebasan ekonomi diantaranya pemberdayaan individu, nondiskriminasi, dan persaingan terbuka.

Kebebasan ekonomi diukur dengan menggunakan indikator yang disebut dengan indeks kebebasan ekonomi. Indeks kebebasan ekonomi memberikan

peringkat terkait tingkat kebebasan individu dalam mengelola kekayaan pribadi di suatu negara pada skala 0 – 100. Laporan indeks kebebasan ekonomi diterbitkan secara tahunan oleh *Heritage Foundation*. Indeks kebebasan ekonomi diukur berdasarkan 12 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat kategori utama sebagai berikut.

1. Supremasi hukum, yang mencakup hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan.
2. Ukuran pemerintah, yang mencakup pengeluaran pemerintah, beban pajak, dan kesehatan fiskal.
3. Efisiensi regulasi, yang mencakup kebebasan bisnis, kebebasan tenaga kerja, dan kebebasan moneter.
4. Pasar terbuka, yang mencakup kebebasan perdagangan, kebebasan investasi, dan kebebasan finansial.

2.1.5.2. Hubungan Indeks Kebahagiaan dan Indeks Kebebasan Ekonomi

Studi yang dilakukan oleh Rode *et al.* (2013) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi membuat orang bahagia. Hal ini dapat terjadi ketika adanya pasar terbuka. Pasar terbuka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, sehingga juga meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Kemudian, Pitlik *et al.* (2015) menekankan bahwa kebebasan ekonomi meningkatkan kebahagiaan individu dengan cara memberikan kebebasan dalam mengendalikan segala hal yang dimiliki dan juga dengan memberi kebebasan untuk memilih di antara pilihan yang berbeda di berbagai pasar.

2.1.6. Indeks Perdamaian Global

2.1.6.1. Pengertian Perdamaian

Perdamaian menurut Galtung (1996) memiliki 2 definisi pertama, perdamaian adalah ketiadaan atau pengurangan segala bentuk kekerasan. Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik yang dilakukan secara kreatif serta tanpa kekerasan. Galtung kemudian mengklasifikasikan perdamaian kedalam 2 kategori yaitu perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif (*positive peace*) diartikan sebagai terciptanya rasa aman dan keadilan ekonomi pada sistem yang berlaku, sampai tidak adanya diskriminasi sosial dalam masyarakat. Perdamaian negatif (*negative peace*) didefinisikan sebagai tidak adanya kekerasan seperti perang.

Institute for Economics and Peace (IEP) merupakan lembaga internasional yang mempelajari hubungan antara bisnis, perdamaian, dan pembangunan ekonomi. Salah satu hasil publikasi IEP adalah laporan indeks perdamaian global. Laporan ini memberikan peringkat tentang tingkat perdamaian dari 162 negara pada skala 1-5 di mana semakin rendah nilai indeks menandakan bahwa semakin damai negara tersebut. Dalam menyusun indeks perdamaian dunia, IEP bekerjasama dengan *Economist Intelligence Unit*. Indeks ini disusun dari 23 indikator kualitatif dan kuantitatif yang mengukur faktor internal dan eksternal. Untuk perdamaian internal diberi bobot skor sebesar 60% dan sisanya 40% untuk perdamaian eksternal. Indikator ini dibagi ke dalam tiga kategori tematik utama sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Kategori Utama Indikator Pengukuran *Global Peace Index*

Kategori Utama	Jumlah indikator
Konflik domestik dan internasional	6
Keselamatan dan keamanan masyarakat	10
Militerisasi	6

Sumber : *Institute for Economics and Peace*

1. Konflik Domestik dan Internasional

Indikator yang termasuk dalam kategori konflik domestik dan internasional antara lain jumlah dan durasi konflik internal; jumlah kematian akibat konflik terorganisir eksternal; jumlah kematian akibat konflik terorganisir internal; jumlah, durasi dan peran dalam konflik eksternal; intensitas konflik internal yang terorganisir; hubungan dengan negara tetangga.

2. Keselamatan dan Keamanan Masyarakat

Indikator yang termasuk dalam kategori keselamatan dan keamanan masyarakat antara lain munculnya kriminalitas di masyarakat, jumlah pengungsi sebagai persentase dari populasi, ketidakstabilan politik, skala terror politik, aktivitas teroris, jumlah pembunuhan per 100.000 orang, tingkat kejahatan kekerasan, demonstrasi kekerasan, jumlah populasi yang dipenjara per 100.000 orang, jumlah petugas keamanan internal dan polisi per 100.000 orang, kemudahan akses ke senjata kecil dan ringan.

3. Militerisasi

Indikator yang termasuk dalam kategori militerisasi antara lain ukuran pengeluaran militer sebagai persentase dari PDB, jumlah personel angkatan

bersenjata per 100.000 orang, volume transfer (impor) senjata konvensional utama per 100.000 orang, volume transfer (ekspor) senjata konvensional utama per 100.000 orang, kontribusi keuangan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB, kemampuan senjata nuklir dan berat.

2.1.6.2. Hubungan Indeks Kebahagiaan dan Indeks Perdamaian Global

Frey *et al* (2004) menjelaskan bahwa rata-rata individu yang tinggal di daerah rawan terorisme memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah jika dibandingkan dengan individu yang tinggal di daerah damai. Lebih lanjut Frey mengungkapkan bahwa ketika terorisme terjadi di suatu negara, terdapat dua kemungkinan yang dapat mempengaruhi kepuasan hidup individu. Frey mengilustrasikan hal ini dengan memisalkan sebuah bom meledak di suatu wilayah. Kemungkinan yang dapat terjadi adalah pertama, wilayah ledakan bom dan sekitarnya mengalami penurunan kepuasan hidup yang sama. Kedua, wilayah ledakan bom mengalami kerugian berupa penurunan kepuasan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.

2.1.7. Indeks Persepsi Korupsi

2.1.7.1. Pengertian Korupsi

Arnold Heidenheimer dalam Priyono (2018:42) mendefinisikan korupsi kedalam tiga kategori. Pertama, definisi yang berpusat pada jabatan publik (*public office-centred definitions*). Dalam kategori ini, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan tanggungjawab sebagai petugas publik untuk kepentingan pribadi. Kedua, definisi yang berpusat pada pasar (*market-centred definitions*). Dalam kategori ini, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan

oleh seorang pegawai negeri yang memanfaatkan kantor sebagai tempat untuk menghasilkan keuntungan sebesar mungkin demi kepentingan dirinya sendiri. Ketiga, definisi yang berpusat pada kepentingan publik (*public interest-centred definitions*). Dalam kategori ini, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang penguasa untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan imbalan berupa uang atau hadiah sehingga kepentingan publik dikesampingkan.

Besarnya tingkat korupsi di suatu negara diukur melalui suatu indikator yaitu indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi didasarkan pada hasil survei persepsi para pengusaha dan para ahli tentang tingkat korupsi di sektor publik. Indeks persepsi korupsi ini memberikan penilaian tentang tingkat korupsi di suatu negara pada skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Laporan tahunan indeks persepsi korupsi dilaporkan secara rutin sejak tahun 1995 oleh *transparency international*, yang merupakan lembaga non pemerintahan berskala internasional yang memiliki kantor cabang di lebih dari 100 negara.

2.1.7.2. Hubungan Indeks Kebahagiaan dan Indeks Persepsi Korupsi

Frey dan Stutzer (2002) menjelaskan bahwa jenis sistem politik yang dijalani orang mempengaruhi kebahagiaan individu, di mana korupsi merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem politik yang mempengaruhi kebahagiaan. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh Li dan An (2020) terdapat empat alasan yang membuktikan bahwa korupsi mempengaruhi kebahagiaan. Pertama, institusi yang korup menghasilkan ketidakpercayaan di antara warga negara dan terdapat bukti bahwa kepercayaan interpersonal meningkatkan kebahagiaan.

Kedua, korupsi menghambat aktivitas investasi dan dengan demikian menurunkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Ketiga, korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan, yang mempengaruhi kesejahteraan. Keempat, korupsi mendistorsi komposisi pengeluaran pemerintah. Kemudian, Helliwell (2002) mengemukakan bahwa individu yang paling bahagia hidup di negara-negara dengan institusi politik yang berjalan dengan baik serta memiliki tingkat saling percaya yang tinggi dan korupsi yang rendah.

2.2. Studi Terkait

Penelitian Suzanna dan Paleologou (2022) yang membahas tentang kebahagiaan, demokrasi dan kondisi sosial ekonomi. Penelitian tersebut menggunakan total sampel sebanyak 57 negara dengan periode 1996-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *Generalized Method of Moments* (GMM). Dengan metode tersebut dilakukan estimasi model untuk sampel penuh yang terdiri dari 57 negara serta untuk 4 sub sampel : sampel negara-negara berpenghasilan tinggi yang terdiri dari 37 negara, sampel untuk negara pasca-komunis, sampel untuk 20 negara eropa termasuk Turki, serta sampel untuk sekelompok negara berpenghasilan menengah. Variabel dependen dalam penelitian adalah indeks kebahagiaan, sedangkan variabel independen adalah indeks demokrasi, indeks korupsi dan GDP riil perkapita. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa demokrasi berpengaruh positif pada sampel penuh dan negara-negara berpenghasilan tinggi, sedangkan untuk variabel korupsi

belum ditemukan bukti yang signifikan secara statistik pengaruhnya terhadap kebahagiaan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Li dan An (2020) yang membahas tentang pengaruh korupsi terhadap kesejahteraan subjektif. Penelitian ini menggunakan data 126 negara yang dianalisis dengan model OLS dan 2SLS. Variabel dependen dalam penelitian adalah indeks kebahagiaan, sedangkan variabel independen adalah korupsi, PDB per kapita, ketersediaan modal, tingkat pengangguran, paparan PM2.5, usia kerja, fraksionalisasi agama, fraksionalisasi etnis, serta fraksionalisasi bahasa. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan subjektif. Lebih lanjut penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi memiliki efek yang signifikan hanya di negara-negara demokratis atau berpenghasilan tinggi.

Penelitian Dorn *et al.* (2006) yang membahas tentang dampak demokrasi terhadap kebahagiaan dengan variabel kontrol yaitu pendapatan dan budaya yang diukur dengan agama dan bahasa. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 28 negara yang datanya diestimasi dengan menggunakan model probit. Dalam penelitian tersebut analisis yang dilakukan yaitu analisis untuk struktur demokrasi yang stabil yaitu periode 1988 dan analisis untuk struktur demokrasi transisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi yaitu periode antara 1988-1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara demokrasi dan kebahagiaan bahkan ketika adanya variabel kontrol pendapatan dan budaya yang diukur dengan bahasa dan agama. Pengaruh

demokrasi terhadap kebahagiaan lebih kuat di negara-negara dengan struktur demokrasi yang stabil.

Penelitian Gropper *et al.* (2011) yang membahas tentang pengaruh kebebasan ekonomi terhadap kebahagiaan. Penelitian ini menggunakan data lebih dari 100 negara pada periode 2005. Variabel dependen dalam penelitian adalah indeks kebahagiaan, sedangkan variabel independen adalah indeks kebebasan ekonomi dan GDP perkapita. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa adanya hubungan positif dari indeks kebebasan ekonomi dan GDP perkapita terhadap indeks kebahagiaan.

Penelitian Yilmaz dan Tag (2016) yang membahas tentang hubungan antara kebebasan ekonomi dan kebahagiaan. Penelitian tersebut menggunakan sampel 137 negara dengan periode 2008-2013. Variabel dependen dalam penelitian adalah indeks kebahagiaan, sedangkan variabel independen adalah empat pilar kebebasan ekonomi diantaranya supremasi hukum, pemerintahan terbatas, efisiensi regulasi, dan pasar terbuka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) dan dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa supremasi hukum, efisiensi regulasi, dan pasar terbuka berpengaruh positif terhadap kebahagiaan, sedangkan pemerintahan yang terbatas berpengaruh negatif terhadap kebahagiaan.

Penelitian Tella dan Macculloh (2005) yang membahas tentang hubungan antara ekonomi politik dan kesejahteraan subjektif. Dengan menggunakan sampel di negara-negara OECD (*Organization of Economic Cooperation and*

Development) selama periode 1975-1992 ditemukan hasil bahwa masyarakat lebih bahagia ketika partai yang berkuasa memiliki kecenderungan ideologi atau pemikiran yang sama dengan dirinya.

Penelitian Welsch (2008) yang membahas tentang pengaruh konflik sipil terhadap kebahagiaan. Variabel dependen dalam penelitian adalah indeks kebahagiaan, sedangkan variabel independen adalah jumlah korban konflik dan perubahan jumlah korban dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa pendapatan per kapita, ukuran populasi, kesehatan, tingkat pendidikan, usia rata-rata, harapan hidup, serta jumlah ilmunan dan insinyur. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jumlah korban konflik dan perubahannya dari waktu ke waktu secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan subjektif (kebahagiaan) secara langsung melalui faktor kesehatan dan psikis serta secara tidak langsung melalui penurunan pendapatan. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa faktor non ekonomi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebahagiaan.

Penelitian Wu dan Jiang Nan (2015) yang membahas tentang pengalaman korupsi terhadap kebahagiaan individu yang di moderasi oleh lingkungan korupsi yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di Cina daratan dengan total responden sebanyak 3.183 orang yang tersebar di 28 provinsi yang ada di Cina. Variabel dependen penelitian adalah kebahagiaan individu, sedangkan variabel independen adalah pengalaman korupsi responden, lingkungan korupsi, serta interaksi antar kedua variabel tersebut (pengalaman korupsi dan lingkungan korupsi). Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara umum pengalaman korupsi berdampak

negatif terhadap kebahagiaan. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa dampak negatif dari pengalaman korupsi lebih besar ketika terjadi di lingkungan yang kurang korup, sedangkan pada lingkungan yang semakin korup dampak negatif yang diberikan semakin berkurang bahkan semakin tidak signifikan mempengaruhi kebahagiaan. Pengalaman korupsi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kebahagiaan hanya ketika tingkat korupsi di suatu provinsi berada pada atau kurang dari 0,278 atau 27,8%. Sedangkan ketika tingkat korupsi di suatu provinsi melebihi 0,398 atau 39,8%, pengalaman korupsi sedikit meningkatkan kebahagiaan.

